



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 31 Oktober 2024

Nomor : 660/0565.c/ DLHK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Hal : Validasi KLHS RPJMD Kota  
Pangkalpinang Tahun 2025-2029

Yth. Pj. Walikota Pangkalpinang  
di-  
Pangkalpinang

Menindaklanjuti surat Pj. Walikota Pangkalpinang Nomor: 660/577/DLH/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, Hal: Permohonan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima perbaikan dan kelengkapan validasi Dokumen KLHS RPJMD Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Pengajuan Validasi Nomor: 04/Berkas-Validasi/DLHK/2024, tanggal 16 Oktober 2024 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 pada tanggal 6 September 2024 dengan Berita Acara Nomor: 04/Rapat-Pra Validasi/DLHK/2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD dan disetujui untuk diberikan **validasi** terhadap KLHS dimaksud (hasil telaahan validasi terlampir) dengan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana hal-hal berikut :

1. Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kota Pangkalpinang agar menginformasikan kepada publik KLHS RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kota Pangkalpinang;

3. Pemerintah Kota Pangkalpinang agar merencanakan pemantauan dan evaluasi terhadap KLHS RPJMD Kota Pangkalpinang serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui;
4. Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib mengintegrasikan KLHS RPJMD Kota Pangkalpinang ke dalam Dokumen RPJMD Kota Pangkalpinang dan melaksanakan verifikasi integrasi/penelaahan KLHS dengan mengajukan permohonan verifikasi integrasi KLHS RPJMD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Cq.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 dan Dokumen RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**TELAAH KLHS RPJMD KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025 – 2029**

No.	Muatan Berita Acara Nomor 04/Rapat- Pra Validasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
<b>MASUKAN UMUM</b>		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat dalam dokumen	Terpenuhi
2.	Memperbaiki Sistematika Laporan sesuai dengan Lampiran I SE Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 7 Agustus 2023	Terpenuhi
3.	Memperbaiki latar belakang agar lebih ringkas dan menyampaikan alasan penyusunan KRP yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak dan peraturan yang sesuai serta dikaitkan dengan kerusakan lingkungan	Terpenuhi
4.	Menggunakan dasar hukum yang relevan dan terkini untuk penyusunan KLHS RPJMD	Terpenuhi
5.	Memperhatikan adanya pengulangan penyajian dan informasi data beserta sumber datanya	Terpenuhi
6.	Memperbaiki istilah penggunaan lahan dan penutupan lahan	Terpenuhi
7.	Menambahkan Kerangka Acuan Kerja dalam pendokumentasian	Terpenuhi
<b>MASUKAN TEKNIS</b>		
1.	Memperbaiki Subbab Maksud, Tujuan dan Sasaran menyesuaikan dengan model pelaksanaan KLHS	Terpenuhi
2.	Memperbaiki Bab Dasar Teori sesuai dengan Petunjuk Teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018	Terpenuhi
3.	Memperbaiki muatan dan urutan penyampaian dalam Bab III sesuai dengan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 7 Agustus 2023	Terpenuhi
4.	Menambahkan data dan informasi kondisi umum daerah tentang enam muatan KLHS sebagai <i>baseline</i>	Terpenuhi
5.	Menampilkan visualisasi data dalam bentuk tabel, grafik dan spasial	Terpenuhi
6.	Memperbaiki penyajian data dan informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146/MenLHK/SETJEN /KUM.1/2/2023	Terpenuhi
7.	Menyampaikan status, kebutuhan air, ketersediaan air dan ambang batas populasi yang dapat didukung oleh Kota Pangkalpinang	Terpenuhi
8.	Membuat tabel dan peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup hingga status	Terpenuhi
9.	Menyajikan Peta Ekoregion menyesuaikan informasi karakteristik bentang alam dan vegetasi sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 04/Rapat- Pra Validasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
	Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021	
10.	Menambahkan tren data perkembangan tiap jenis tutupan lahan	Terpenuhi
11.	Melengkapi data dan informasi mengenai risiko dampak sebagai pendukung perumusan isu paling strategis	Terpenuhi
12.	Menambahkan pihak-pihak yang berkepentingan pada bagian Keterkaitan Peran Para Pihak	Terpenuhi
13	Memperbaiki tahapan perumusan isu serta menambahkan data dan informasi bencana dan risiko dampak untuk mendukung isu dari karakteristik wilayah	Terpenuhi
14	Menambahkan keterlibatan atau dukungan non Pemerintah terhadap capaian Indikator TPB beserta anggarannya	Terpenuhi
15.	Mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup, demografi, dan anggaran pada tahun 2030 berdasarkan hasil proyeksi untuk merumuskan skenario Dengan Upaya Tambahan	Terpenuhi
16.	Memperhatikan isu aspek sosial dalam Isu Strategis KLHS	Terpenuhi
17.	Mencermati kembali rekomendasi program dan kegiatan yang tepat untuk mengintervensi capaian masing-masing indikator TPB sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Terpenuhi
18.	Memperhatikan dan mengkonfirmasi kepada instansi terkait mengenai capaian indikator bidang kesehatan	Terpenuhi
19.	Mempertimbangkan untuk memasukkan data dan informasi beberapa daerah yang menjadi titik-titik banjir rob di wilayah Kota Pangkalpinang terkait dengan isu alih fungsi lahan dan perubahan iklim	Terpenuhi
20.	Memperbaiki narasi parameter wajib Indeks Kualitas Air sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021	Terpenuhi
21.	Mencantumkan strategi upaya yang akan dilakukan untuk solusi isu strategis dan indikator terkaitnya dengan mempertimbangkan capaian TPB, peran para pihak, dan kemampuan keuangan/penganggaran	Terpenuhi
22.	Memasukkan indikatif anggaran sebagai bagian rekomendasi	Terpenuhi
23.	Menyesuaikan target indikator RPJMD dengan indikator utama RPJPD periode I	Terpenuhi